AKSES REFORMA AGRARIA DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA DAN FASILITAS AKSES PEMASARAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:
THITUS B R BONPAYA
NIT: 21303662

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of agrarian reform access through business development assistance and marketing facilitation activities in Bangunkerto Village, Turi District, Sleman Regency, and to analyze the challenges encountered along with the efforts made to address them. A descriptive qualitative approach was employed in this research. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving purposively selected informants, including the Sleman Regency Land Office, local government officials, and members of the community participating in the agrarian reform program.

The findings indicate that agrarian reform access has been implemented through business development assistance, community capacity building, and the expansion of market access. These initiatives have contributed to increased community knowledge, business growth, and broader marketing networks. However, the implementation continues to face several challenges, including limited resources, low community participation, and restricted market access.

To overcome these obstacles, efforts have been made to strengthen inter-institutional coordination, increase the frequency of business assistance, and expand collaboration with relevant stakeholders. Therefore, agrarian reform access plays a strategic role in improving community welfare by supporting business development and expanding market opportunities.

Keywords: Agrarian Reform, Business Development Assistance, Market Access, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Bangunkerto.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi akses reforma agraria melalui kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, serta menganalisis kendala dan upaya penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, pemerintah daerah, dan masyarakat peserta reforma agraria.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses reforma agraria diwujudkan melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pembukaan akses pemasaran. Kegiatan ini berdampak pada peningkatan pengetahuan, pertumbuhan usaha, dan perluasan jaringan pemasaran.

Namun pelaksanaannya masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan sempitnya akses pasar. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan frekuensi pendampingan, dan perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, akses reforma agraria memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha dan akses pasar yang lebih luas.

Kata kunci: Reforma Agraria, Pendampingan Usaha, Akses Pemasaran, UMKM, Bangunkerto

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cakupan reforma agraria tidak terbatas pada penataan aset melalui legalisasi dan redistribusi tanah, melainkan juga mencakup penataan akses agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, strategi yang dijalankan meliputi legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, penguatan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat.

Penataan akses memiliki peran krusial karena kepemilikan tanah saja belum cukup menjamin peningkatan kesejahteraan. Masyarakat masih membutuhkan dukungan berupa penguatan kapasitas, kelembagaan, pendampingan usaha, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, pengembangan produk, dan keterbukaan akses pasar. Dengan demikian, reforma agraria tidak berhenti pada jaminan kepastian hukum tanah, tetapi juga diarahkan agar tanah menjadi sumber penghidupan dan aset produktif.

Salah satu wujud penataan akses adalah pendampingan pengembangan usaha. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memetakan potensi ekonomi, menyusun rencana usaha, meningkatkan keterampilan produksi, memperbaiki tata pengelolaan kelembagaan, dan menciptakan produk bernilai tambah. Pendampingan juga penting untuk mengatasi kendala usaha seperti minimnya modal, kapasitas manajerial yang rendah, pengemasan produk yang belum optimal, dan lemahnya jaringan dengan pelaku usaha lain.

Selain itu, fasilitasi akses pemasaran merupakan bagian penting dari penataan akses. Produk masyarakat kerap menghadapi masalah kontinuitas produksi, mutu, standar kemasan, promosi, distribusi, dan daya tawar. Jika pemasaran hanya melalui jalur terbatas, harga yang diterima rendah dan kepastian pasar tidak ada. Karena itu

fasilitasi pemasaran perlu membangun kemitraan antara kelompok usaha dengan pasar, pemerintah, koperasi, swasta, dan pihak lain guna memperluas penyerapan produk.

Kabupaten Sleman memiliki potensi besar di bidang pertanian dan UMKM. Potensi ini harus didukung melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, kalurahan, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Pelaksanaan reforma agraria harus dilakukan secara terpadu, bukan sektoral, agar penataan aset dan akses berjalan bersamaan.

Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, merupakan salah satu titik pelaksanaan Gerakan Sinergi Reforma Agraria Kabupaten Sleman yang dicanangkan pada 22 April 2024 di Kantor Kalurahan Bangunkerto. Gerakan ini bertujuan mendorong potensi usaha melalui penataan akses dan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan fasilitasi pendampingan. Program ini digagas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bersama perangkat daerah terkait.

Kajian terhadap pendampingan usaha dan fasilitasi pemasaran di Bangunkerto penting dilakukan karena keberhasilan penataan akses tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga proses dan keterlibatan semua pihak. Aspek yang perlu ditelaah meliputi perencanaan, sasaran, materi, metode, partisipasi, koordinasi, dan keberlanjutan. Untuk pemasaran, perlu dikaji bentuk jaringan, kesesuaian dengan kebutuhan usaha, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan kelompok mempertahankan akses pasar.

Kajian tentang akses reforma agraria di Kalurahan Bangunkerto menjadi relevan karena setiap wilayah memiliki kekhasan dalam aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan potensi usaha. Program yang dirumuskan secara umum tidak selalu tepat sasaran dengan kondisi masyarakat di tingkat kalurahan. Karena itu dibutuhkan penelitian ini untuk melihat bagaimana program tersebut dijalankan di lapangan, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Melalui penelitian ini dapat diketahui sejauh mana pendampingan pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran mampu meningkatkan kapasitas usaha serta kesejahteraan masyarakat.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pengelolaan kepemilikan tanah. Reforma Agraria kini tidak lagi hanya difokuskan pada legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga pada upaya penataan akses (*access reform*). Program ini bertujuan agar pemilik tanah memiliki akses ke berbagai sumber ekonomi dan mampu memberdayakan tanah mereka. Terkait pentingnya kebijakan penataan akses ini, Suranto (2018) menyatakan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pengelolaan aset tanah. Dalam proses ini, masyarakat sering menghadapi berbagai kendala, sehingga perlu adanya pendampingan, pengarahan, bimbingan, dan fasilitasi. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa saja masyarakat pemilik tanah perlu didampingi, dibimbing, dan difasilitasi Seperti apa bentuk pendampingan dan fasilitasi tersebut Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan, pengarahan, dan pemberian fasilitas tersebut

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi dan mulai diperhatikan dunia internasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ini adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan skala atau ukurannya, yang mencakup usaha perorangan, kelompok, atau badan usaha kecil. UMKM adalah tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia Berdasarkan kriteria di atas, UMKM dibagi menjadi tiga jenis:

1. Usaha Mikro:

   Usaha dengan modal usaha paling banyak Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan paling banyak Rp 2 miliar.

2. Usaha Kecil:

   Usaha dengan modal usaha antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan antara Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar.

3. Usaha Menengah:

   Usaha dengan modal usaha antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan lebih dari Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar

Maka, munculnya pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil, dan

Menengah (UMKM). menjelaskan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, tanah objek Reforma Agraria mengalami perluasan (Sumanto, 2023). menjelaskan, bahwa dalam konteks kedaulatan pangan, reforma agraria diupayakan agar masyarakat dapat menyediakan pangan yang sehat, aksesibel, dan secara budaya layak dan berkeadilan sosial (Wulan Pujiriyani, 2022:39).

Reforma agraria, tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik (Arisaputra, M. I 2016:01). Menyatakan, bahwa tujuan pembaharuan agraria yang terdapat pada TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 memiliki tujuan yaitu mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi (tanah), penataan kesenjangan atas penguasaan kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria; dan mengurangi sengketa pertanahan maupun agraria. TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 menjadi salah satu kunci penting dalam kebijakan agraria. Dengan demikian terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang di lakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) insentif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM (e)

Penyediaan Penyangga Produk(Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021:49). Menguraikan, bahwa terpenting dalam capaian keberhasilan pengembangan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial. Unsur modal sosial yang dimaksud diantaranya adalah saling percaya pada sesama anggota masyarakat, empati sosial, kesatuan sosial, kepedulian sosial, dan kerja sama kolektif (Mangkuprawira, 2010:19). Membicarakan, bahwa program reforma agraria (RA) ditujukan untuk menata ketimpangan agraria dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Refleksi atas kinerja GTRA pada setiap daerah dibutuhkan untuk mengakselerasi program RA

secara nasional.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam rangka peningkatan kegiatan oleh GTRA Nasional atas nama RA, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat atas struktur agraria (Junarto, 2022-133). Menerangkan, bahwa perlu penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dalam ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga diluar daerah dan semakin berkembang (Putra, 2016:41).

Windusancono (2021:01) menyampaikan, bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil (UMKM) adalah dengan membuat strategi baru tentang pemasaran dan penjualan baik secara online dan offline di era baru. Dampak globalisasi menyebabkan persaingan ketat dalam impor ekspor barang dan jasa, sehingga pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran rakyat tercapai secara merata. Isu yang berkembang adalah upaya meningkatkan kemandirian UMKM di masa yang akan datang, perlu strategi baru dalam membangun hubungan antara UMKM dengan Bank. Agar tujuan pemerataan ekonomi terlaksana perlu kebijaka pemerintah dalam mengatur regulasi pertumbuhan usaha UMKM dan percepatan perwujudan kemandirian usaha masyarakat, peran serta pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM modern perlu dituangkan dalam peraturan yang baru agar pemerintaan ekonomi segera terwujud. Pasar UMKM merupakan sebuah wadah bagi penjual dan pembeli sehingga terjadi interaksi antara penjual dan pembeli dalam menawarkan produk dan melakukan interaksi jual-beli. Keberadaan pasar bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat agar bisa memenuhi berbagai keinginan yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup. Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian "Akses Reforma Agraria Dalam Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha Dan Fasilitas Akses Pemasaran Di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman"

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penataan akses dalam reforma agraria, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan jaringan pemasaran. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,

Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kalurahan Bangunkerto, dan kelompok masyarakat guna meningkatkan efektivitas, partisipasi, serta keberlanjutan program pendampingan usaha dan fasilitasi pemasaran.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akses reforma agraria dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?
2. Apa saja Kendala dan solusi dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman bagi masyarakat setempat?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui sejauh mana progres tahapan pelaksanaan Akses Reforma Agraria dalam kegiatan pendampingan dan pengembangan usaha di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui dampak Akses Reforma Agraria mengenai tingkat pengembangan nilai ekonomi pada masyarakat setempat melalui pengembangan usaha dan akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini ialah untuk:

1. Manfaatnya agar dapat melihat perkembangan yang terjadi terhadap penataan akses dalam hal potensi wilayah untuk kepentingan masyarakat
2. Manfaat Akademis

Memberikan tambahan pengetahuan tentang hubungan antara potensi ekonomi dan akses Reforma Agraria

3. Manfaat Sosial

   Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial di identifikasi dari keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial. Ukuran kesejahteraan ini dapat dilihat dari pendapatan masyarakat apakah dari pendapatan itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Oleh karena itu ukuran kesejahteraan tidak dapat ditentukan secara absolut dalam angka. Sehingga Reforma Agraria dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menyelesaikan konfik Agraria yang sering terjadi akibat ketidak adilan dalam penguasaan tanah dengan demikian dapat memberikan kebijakan yang penting guna mencapai keadilan sosial, pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

BAB II
KAJIAN TERDAHULU

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini calon peneliti bertujuan agar mengetahui informasi terkait pelaksanaan akses reforma agraria dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di kalurahan bangunkerto, kapanewon turi, kabupaten sleman . Penelitian dengan Judul Keragaman Dan Potensi Agribisnis Salak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta oleh (Lutfi Isnaini, 2018) . menyatakan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) cara petani dalam menghadapi harga salak yang fluktuative, 2) untuk mengetahui sejauh mana keragaan salak di Kecamatan Turi, 3) untuk mengetahui bagaimana petani mengembangkan keragaan salak dan potensi agribisnis salak di Kecamatan Turi. Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, Analisis data yang pertama yang digunakan adalah analisis tabel dan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mencari kelayakan usahatani dengan cara mencari keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan usahatani merupakan selisi antara nilai output dikurangi dengan nilai input. Apabila nilai positive berarti untung dan apabila negative berarti rugi. Secara umum rumusnya adalah =R-C. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Petani tetap bertahan dengan cara memperbanyak budidaya salak pondoh dan salak gading untuk mempertahankan pendapatan dan perekonomian petani meskipun harga salak yang fluktuative. 2) Keragaan salak di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman hanya menanam salak pondoh dan salak gading, dan petani lebih banyak membudidayakan salak pondoh dibandingkan dengan salak gading. Pengembangan salak gading di Kec. Turi bertujuan untuk mangantisipasi harga salak. 3) Dari sudut pandang harga, terjadi penurunan harga salak pondoh pada saat panen raya dan pada saat tidak panen raya sehingga potensi untuk dikembangkanya salak pondoh sangat rendah. Tetapi pada salak gading terjadi peningkatan harga pada saat panen raya dan disaat tidak panen raya.

Penelitian dengan Judul Pendampingan dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala oleh (Saheriyanto, 2021). menyampaikan, penelitian ini bertujuan implementasi Kebijakan Reforma Agraria Access Reform meliputi pemetaan sosial, fasilitasi dan kerjasama

dengan pihak terkait, penyuluhan, penyusunan model pemberdayaan dan pendampingan pemberdayaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada pelaksanaan *access reform* di lokasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pelepasan Kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, strategi yang dapat diterapkan demi keberlanjutan *access reform* yaitu membangun kerja sama sinergis dengan para pihak terkait kegiatan reforma agraria, membentuk kelompok kerja pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, mendorong secara signifikan kegiatan pemberdayaan masyarakat/*access reform* melalui pemberian aneka jenis fasilitasi (bantuan bibit, pupuk dan pembasmi hama dari Dinas Pertanian), membantu pemasaran dengan mengenalkan saat acara-acara besar di daerah dan pemasaran oneline, menjembatani akses peminjaman modal usaha berdasarkan subjek *by name by address* penerima redistribusi tanah, memfasilitasi peminjaman alat berat untuk pengolahan lahan, menyosiallisasikan pentingnya akses reform terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, merekrut tenaga *field staff* untuk melakukan pendampingan usaha di Masyarakat

Penelitian dengan Judul Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia oleh (Fatimah, 2015) menyebut, bahwa penelitian ini bertujuan Reforma agraria atau land reform, pembaharuan agraria merupakan suatu perubahan besar dalam struktrur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Reforma agraria suatu persoalan yang sangat dibutuhkan pada saat ini oleh masyarakat indonesia dengan mengingat kebutuhan akan tanah sangat meningkat untuk pembangunan sedangkan tanah itu sendiri adalah tetap. Reforma agraria itu sendiri pada reformasi telah diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR2001, yang harus membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat indonesia seperti juga yang diamantkan dalam tujuan pembangunan indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil sensus Pertanian (ST) 2013 dengan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta, sebagian para pekerja di sektror pertanian hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian asas- asas hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum

Pada penelitian yang di lakukan oleh peneliti dengan Judul Akses Reforma Agraria Dalam Kegiatan Pendampingan Usaha Dan Fasilitas Akses Pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman oleh Thitus B R Bonpaya pada tahun 2025, mengungkapkan bahwa bertujuan untuk mengenali dan mengevaluasi langkah- langkah pelaksanaan akses reforma agraria dalam pendampingan pengembangan usaha di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, serta menilai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan usaha dan akses pemasaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan saran mengenai pengembangan kebijakan dan program reforma agraria yang lebih efisien di masa mendatang, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan dampak yang telah diteliti di wilayah tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Akses Reform

Reforma agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Dalam menjalankan pelaksanaan reforma agraria maka dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data laporan GTRA Tahun 2021 dan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan pilot project Kampung reforma agraria (Ananda Resti dkk., 2022). Reforma Agraria sebagai Landreform yang berada di dalam mandat konstitusi, politik, dan undang undang yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah namun ditambahkan juga *access reform*. Kata kunci “mewujudkan keadilan” dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah menjadi frasa kunci yang harus *diejawantahkan* dalam program reforma agraria. Selanjutnya “*access reform*” atau penataan akses menjadi bagian program lanjutan dan tidak terpisahkan dari kegiatan mewujudkan keadilan

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Winoto, 2007:777). Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 reforma agraria didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Definisi tersebut sama dengan definisi tentang reforma agraria oleh Winoto (2007, hal-777), dimana reforma agraria terdiri dari dua program yang terpadu dan berkesinambungan antara penataan aset dengan penantaan akses dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara lebih rinci dalam Pasal 2, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 disebutkan bahwa Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut di atas bermakna bahwa melalui cara mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, pemerintah akan menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria.

2. Penataan aset

Menjadi dasar dalam penataan akses, Penataan aset meliputi kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah bersumber dari tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, bekas tanah hak guna usaha, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan yang masuk ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dengan adanya penataan aset diharapkan dapat memberikan ruang atas kepemilikan tanah dengan adanya sertipikat sebagai kepastian hukum dan diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir ketidak adilan bagi masyarakat. Ketidak seimbangan pemilikan tanah dan sumber agraria dapat

menimbulkan masalah, sehingga indikasi sejahtera dan tidaknya masyarakat dapat ditentukan melalui pemerataan pemilikan dan penguasaan: tanah (Utomo, 2021). Fokus program reforma agraria adalah penyediaan lahan TORA seluas 9 juta hektar. Dari luasan tersebut 4,5 juta hektar dialokasikan untuk kegiatan legalisasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektar untuk sertipikasi tanah dan 0,6 juta hektar untuk lahan transmigrasi. Berdasarkan data dari deputi penataan ruang dan pertanahan, sampai dengan bulan desember 2020 kegiatan legalisasi aset telah mencapai 5,18 juta hektar (115,12%) dari target 4,5 juta hektar yang terdiri dari:

a. Sertifiikasi tanah rakyat (Prona/PTSL) sejumlah 20,4 juta bidang seluas 5,05 juta hektar (129,48%) dari target 3,9 juta hektar; dan
b. Sertipikat tanah transmigrasi sejumlah 144.967 bidang seluas 130.134 hektar (21,68%) dari target 0,6 juta hektar.

Redistribusi tanah dialokasikan seluas 4,5 juta hektar yang terdiri dari 0,4 juta hektar dari lahan terlantar dan 4,1 juta hektar dari pelepasan kawasan hutan. Capaian redistribusi tanah berdasarkan data deputi penataan ruang dan pertanahan sampai dengan bulan agustus 2020 adalah 1.123.841 hektar (24,97%) dari target 4,5 juta hektar yang terdiri dari:

a. Capaian redistribusi tanah dari eks-HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejumlah 1.407.222 bidang seluas 919.897,55 hektar (229,97%) dari target 0,4 juta hektar; dan
b. Capaian pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA sejumlah 361.803 bidang seluas 203.943 hektar (4,97%) dari target 4,1 juta hektar.

3. Penataan Akses

Penataan Akses merupakan salah satu kegiatan penting dari pemberdayaan masyarakat dalam konteks Reforma Agraria, yang disarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Salah satunya kegiatan yang dilakukan dalam penataan akses adalah peningkatan kepastian kelembagaan. Peran dari masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan reforma agraria, karena reforma agraria merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan sehingga terbentuk kelompok masyarakat yang sejahtera. Reforma agraria juga bertujuan untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan dan kesejateraan masyarakat yang merata, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Penataan akses menjadi langkah penting dalam pembangun di negara-negara yang berkembang, akses yang memadai sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat, dan keberhasilan tujuan pembangun dapat diukur dari tingkat keberhasilan penataan akses tersebut.

Pemerintah perlu melakukan penataan akses yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat melihat potensi, peluang, dan kendala yang ada. Lahan pertanian merupakan aspek penting dalam memastikan kedaulatan pangan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk di luar wilayah. Penataan akses dapat dilakukan melalui pengelompokan infrastruktur, kerja sama dengan masyarakat yang memiliki sertifikat melalui skema kemitraan dan kerja sama antar kelompok masyarakat dalam penyertaan modal. Pemberdayaan masyarakat harus fokus pada pemilik tanah dan didampingi untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan tanah. Melalui pembentukan kelembagaan, masyarakat yang menerima reforma agraria dapat mengorganisir diri mereka sendiri dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan jenis bidang usaha yang mereka tekuni. Dengan adanya peningkatan kepastian kelembagaan, diharapkan masyarakat yang menerima reforma agraria dapat lebih mandiri dan berkembang secara ekonomi. Mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, teknologi, dan dukungan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

4. Potensi Wilayah

Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu keberlanjutan sistem sosial, keberlanjutan sistem ekonomi dan keberlanjutan sistem ekologi (Sugandly dan Hakim, 2007). Dalam mewujudkan keberlanjutan sistem sosial menuntut pemanfaatan sumber daya alam yang harus memperhatikan aspek pemerataan keadilan sosial. Keberlanjutan sistem sosial artinya adalah bahwa sumber

daya alam harus dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek pemerataan keadilan sosial. Keberlanjutan sistem sosial menekankan pada peningkatan kualitas pada kuantitas dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam hal ini. Terbangunnya sistem keberlanjutan sosial yang telah memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensinya diharapkan akan menjamin terbangunnya keberlanjutan ekonomi. Ini dimaknai sebagai cara untuk mempertahankan atau menjaga sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya sosial agar tidak mengalami kemerosotan. Keberlanjutan ekologi adalah keberlangsungan atau terjaganya kelestarian dan fungsinya komponen lingkungan akan secara otomatis terbangun jika keberlanjutan sistem sosial dan sistem ekonomi sudah terbangun. Konsep ini juga merupakan bagian penting yang harus diwujudkan dalam melaksanakan misi penataan akses reforma agraria.

Potensi non-fisik Wilayah yang relatif perbukitan dan merupakan pusat dari kegiatan pariwisata, dan pertanian. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi potensi fisik wilayah Kalurahan Putat yang diteliti ini? Potensi fisik wilayah kalurahan yang bekaitan dengan batuan, geomorfologi, jenis tanah, kemiringan lahan, pertanian, peternakan, dan lainnya.

a) Potensi non-fisik di wilayah Kalurahan Putat lebih dimaksudkan sebagai keberadaan dan keadaan penduduk meliputi jenis kelamin, jumlah, umur produktif dan umur non-produktif, pendidikan dan kemampuan teknis serta teknologi yang dikuasai. Lebih dari itu adalah buah budi manusia di kalurahan berupa seni dan budaya. Bentuk - bentuk usaha yang telah diciptakan dan akan diciptakan serta dikembangkan oleh penduduk sebagai sumberdaya manusia juga bagian penting sebagai potensi non-fisik wilayah desa ini. Di dalamnya ada usaha pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tangga, kerajinan, jasa baik dalam sekala mikro, kecil maupun menengah (UMKM) baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam wujud koperasi maupun korporasi.

C. Kerangka Pemikiran

Proses "Penataan Akses" bertujuan untuk memperkuat kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penataan akses ini adalah memberikan dukungan yang lebih terorganisir bagi UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang saling berkaitan dan semuanya berkontribusi pada perkembangan UMKM secara menyeluruh. Tahap awal dalam diagram ini adalah peningkatan kapasitas UMKM. Langkah ini menjadi dasar dari upaya penataan akses, di mana UMKM diberikan berbagai bantuan dan fasilitas untuk memperbaiki daya saing mereka. Peningkatan kapasitas ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen usaha, peningkatan sumber daya manusia, dan akses ke pasar.

Dalam peningkatan kapasitas UMKM, terdapat dua jalur utama yang dilakukan, yaitu Pendampingan Usaha dan Peningkatan Kualitas SDM. Kedua jalur ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa UMKM memiliki strategi bisnis yang tepat dan juga tenaga kerja yang terampil untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan Pendampingan Usaha merupakan langkah yang sangat penting dalam penataan akses ini. Pendampingan dilakukan melalui berbagai program, termasuk pelatihan manajemen bisnis, mentor dari para ahli, serta bimbingan dalam administrasi keuangan dan pemasaran. Tujuan UMKM adalah untuk memahami cara mengelola usaha mereka dengan cara yang profesional dan efisien. Sementara itu, Peningkatan Kualitas SDM bertujuan untuk mengasah keterampilan dan keahlian tenaga kerja dalam UMKM. Program ini mencakup pelatihan teknis, pengembangan *softskils*, dan pendidikan kewirausahaan. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan UMKM dapat beroperasi dengan lebih efektif dan mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin rumit.

Setelah melewati tahap pendampingan usaha dan peningkatan kualitas SDM, langkah berikutnya adalah Fasilitasi Akses Pemasaran ini adalah tahap penting yang memastikan bahwa produk dan layanan UMKM dapat mencapai pasar yang lebih luas. Fasilitasi ini dapat dilakukan melalui penguatan jaringan distribusi, pemanfaatan *platform* digital, serta kolaborasi dengan mitra strategis. Fasilitasi akses pemasaran juga mencakup

memperkenalkan UMKM ke pasar internasional, misalnya melalui partisipasi dalam pameran dagang, kerja sama dengan *e-commerce global*, serta dukungan dalam memenuhi standar kualitas untuk ekspor. Dengan ini, UMKM tidak hanya tumbuh di tingkat lokal tetapi juga memiliki peluang untuk bersaing secara global. Dampak berbagai bentuk hasil yang diharapkan dari proses tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) aspek dampak berikut:

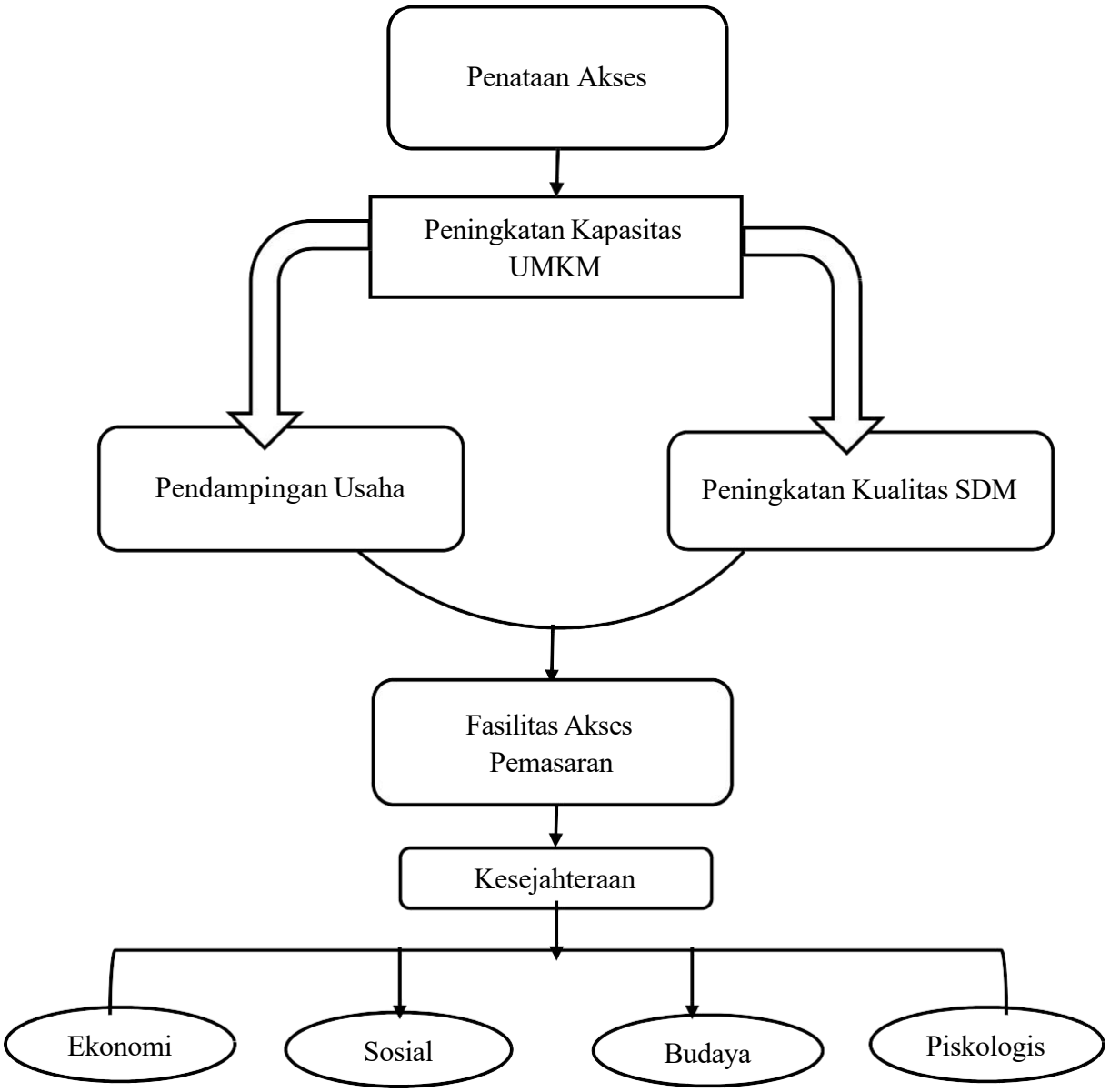
1. Ekonomi meningkatnya pendapat, terbukanya lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi lokal
2. Sosial Penguatan jaringan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Pelestarian nilai-nilai lokal dan budaya usaha berbasis kearifan lokal
4. Meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan semangat kewirausahaan pelaku UMKM.

Sebagai kesimpulan, diagram alir ini menunjukkan penataan akses menjadi langkah strategi untuk memperkuat peran UMKM dalam pembangunan ekonomi. Dengan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pendampingan usaha dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelaku usaha kecil dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pasar yang kompetitif dengan lebih baik. Fasilitasi akses pemasaran memberikan peluang lebih luas bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka.

Proses ini tidak hanya berdampak positif bagi pertumbuhan usaha, tetapi juga memberikan manfaat yang merambah berbagai aspek kehidupan:

1. Ekonomi, melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.
2. Sosial, dengan memperkuat struktur dan relasi sosial dalam masyarakat.
3. Budaya, lewat pelestarian nilai lokal yang terkandung dalam produk UMKM
4. Pisikologis, berupa tumbuhnya kepercayaan diri dan motivasi wirausaha.

Secara keseluruhan, pendekatan ini menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM dan secara bersamaan memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Sumber: Penelitian, 2025

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Format Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2024: 5-6) penelitian studi kasus adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam kehidupan nyata yang bersifat kontemporer atau terjadi saat ini, terhadap suatu program, kejadian, proses, aktifitas, terhadap satu orang atau lebih. Pengkajian tersebut dilakukan melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian studi kasus selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi kasus dan perumusan tema-tema utama yang ditemukan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi Kabupaten Sleman. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan informasi yang calon peneliti ketahui dari internet bahwa pelaksanaan kegiatan Akses Reforma Agraria Dalam Kegiatan Pendampingan Pemngembangan Usaha Dan Fasilitas Akses Pemasaran mencakup Kalurahan ini. Pada lokasi tersebut juga sudah dikembangkan kegiataan reforma agraria telah dilaksanakan dengan adanya pengambangan data pertanahan melalui portal web berbasis webgis.

C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pemilihan Informan

1. Jenis

   Jenis data dalam penelitan ini berupa data kualitatif, yaitu data berbentuk kata-kata atau narasi yang menggambarkan makna dari peristiwa atau keadaan nyata yang sedang diamati. Sugiyono (2024: 9) menegaskan bahwa data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami makna, keunikan, dan menyusun narasi berdasarkan fenomena yang ada.

2. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder. Menurut Sugiyono (2024: 104), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Uraian mengenai masing-masing jenis data beserta sumber perolehannya disajikan sebagai berikut:

1. Data Primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini dihimpun secara langsung melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Wawancara diarahkan kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran, Kepala Lantpr Pertanahan Kabupaten Sleman, Pegawai Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten, dan Masyarakat Berpartisipasi. Selain itu, peneliti juga menyusun catatan lapangan selama proses observasi serta melakukan dokumentasi saat pelaksanaan penelitian.

2. Data Sekunder

   Sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang bersifat publik, yang bersumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang diakses melalui web page dan Kantor Kalurahan Bangungkerto, seperti:

   a. Data dan laporan kegiatan Penataan Akses Refroma Agraria di Desa Sendangmulyo dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
   b. Data potensi fisik Kalurahan Bangungkerto dari Kantor Kalurahan Sendangmulyo.
   c. Data Kelompok UMKM Kalurahan Bangunkerto.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi utama atau disebut informan. Pemilihan informan pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan relevansi peran terhadap pelaksanaan Akses Reforma Agraria dalam Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha dan Fasilitas Akses Pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kaponewon Turi, Kabupaten Sleman.

a. Data Primer

   Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari lapangan atau dari sumber-sumber terkait. Data yang dikumpulkan dapat berupa

observasi dan wawancara. Data primer yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan akses reforma agrarian dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumen, dan sumber informasi. Data sekunder ini digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini untuk memperkuat argumen dalam penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder melalui studi dokumen.

D. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data

Pengumpulan data primer dari informan dilakukan melalui teknik wawancara, dengan menggunakan kuesioner terbuka dan alat pencatat sebagai instrumen pendukung. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah, dan Pihak Yang Berhak dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan menggunakan alat pencatat sebagai instrumen utama..

1. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain:

a. Mengumpulkan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi wawancara yang mendalam, dan dokumentasi serta gabungan ketiganya *(tringulasi)*.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok. memfokuskan ke hal yang penting. Reduksi data bertujuan untuk memberikan Gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakuka pengumpulan data selanjutnya. Tahap reduksi dan abstraksi data, yaitu tahapan untuk menghapus sebagian data, yaitu tahapan untuk menghapus sebagian data yang didapatkan meskipun masih relevan, tetapi tidak ada urgensinya dalam penyusunan abstraksi. Dengan tujuan agar lebih sistematis dan mudah dipahami dalam

menyusun penjelasan informan

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Administrasi Kalurahan Bangunkerto

Kalurahan Bangunkerto merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta. Secara geografis Kalurahan Bangunkerto dengan koordinat 7°39’ Lintang Selatan 110.3648 Lintang Selatan dan 7.6408 Bujur Timur. Kalurahan Bangunkerto merupakan salah satu dari 4 Kalurahan yang terletak di Kapenawon Turi.

Kalurahan ini mempunyai karakteristik letak geografis yang berbeda disetiap penamaannya, dimulai dengan wilayah paling utara disebut Girikerto, daerah itu juga disebut wonokerto dengan kawasan daerah berupa hutan. Dibagian selatan daerahnya berupa tanah yang kaya dan subur sehingga disebut Donokerto, dan didaerah yang ke 3 merupakan daerah yang gersan serta tandus dikenal dengan sebutan Bangunkerto. Secara administrasi wilayah kalurahan Bangunkerto dibatasi dengan beberapa kalurahan disebelahnya yaitu :

Utara : Berbatasan dengan Kalurahan Wonekerto Kapanewon Turi

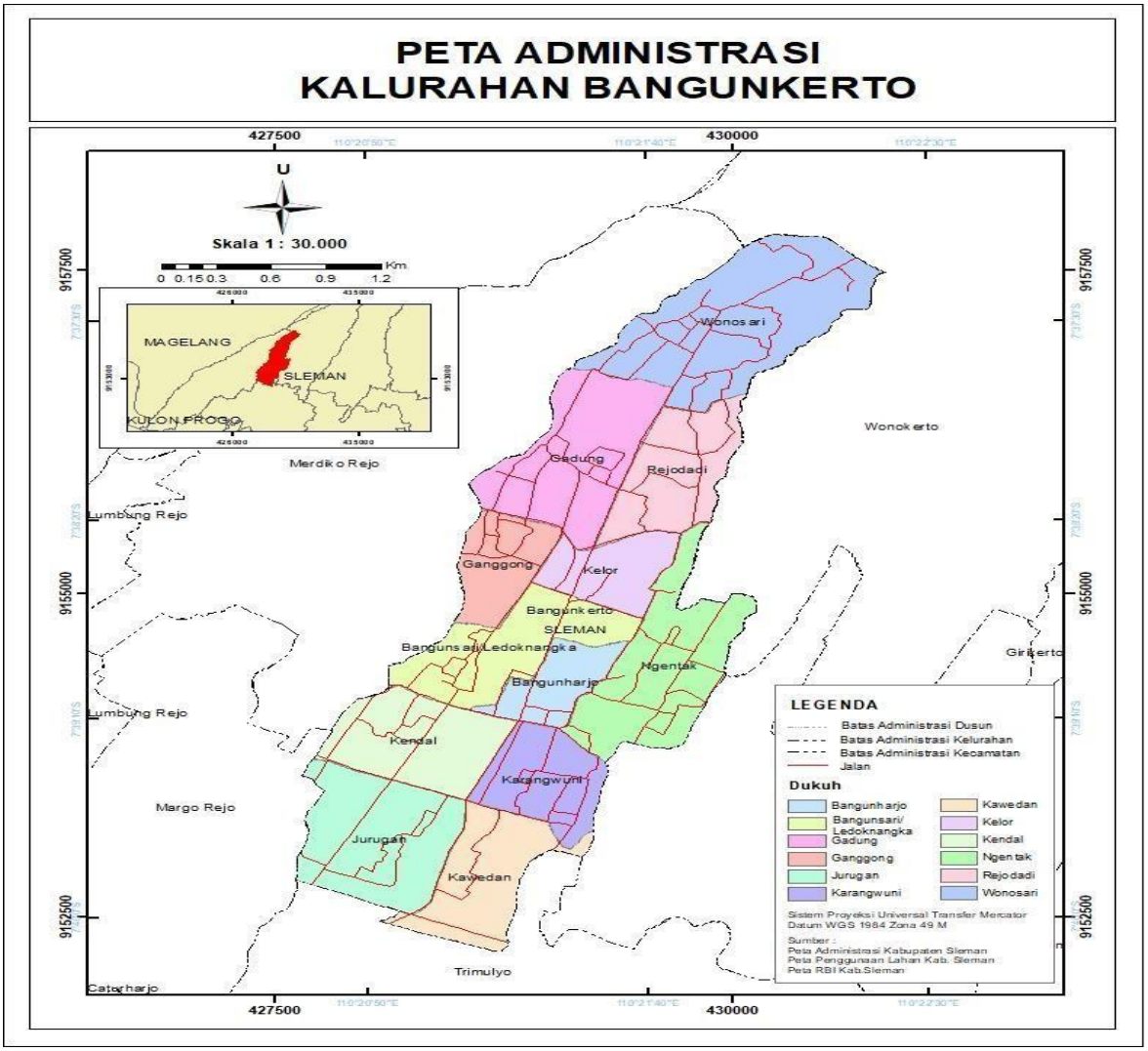
Timur : Berbatasan dengan Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi

Selatan : Berbatasan dengan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman

Barat : Berbatasan dengan Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel

Wilayah Kalurahan Bangunkerto berada pada ketinggian 300 – 600 m di atas permukaan laut. Suhu rata-rata berkisar antara 21 °C sampai dengan 24 °C, dengan rata-rata curah hujan 350 mm dan jumlah hujan yang tidak tentu per tahunnya. Secara administratif Kalurahan Bangunkerto adalah bagian dari Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Pemerintahan Kalurahan Bangunkerto dikelola oleh Lurah yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, Lurah dibantu oleh perangkat kalurahan yang terdiri dari Carik (sekretaris kalurahan), Kepala Seksi (Kasi) yang membawahi berbagai bidang seperti pemerintahan, pembangunan, pelayanan, serta dukuh (kepala dusun) yang bertanggung jawab atas pengelolaan masing-masing wilayah pedukuhan.

Kalurahan Bangunkerto terdiri dari 12 padukuhan berikut adalah daftar padukuhan di kalurahan bangunkerto : 1). Wonosari, 2). Gadung, 3). Ganggong, 4). Bangunsari, 5).Kendhal, 6). Jurugan, 7). Kawedan, 8). Karangwuni, 9). Bangunharjo, 10).Ngenthak, 11). Kelor, 12). Rejodadi.



Gambar 2. Peta Administrasi Kalurahan Bangunkerto

Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Sleman tahun 2024

B. Kondisi Aksesibilitas

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas wilayah terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Aksesibilitas juga dapat diukur dengan membandingkan

antara jumlah jaringan jalan dalam suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Aksesibilitas juga dapat didefinisikan sebagai ukuran dalam memberikan kemudahan secara lokasi atau tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan "mudah" atau "susah" nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

Aksesesibilitas merupakan salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar dan pusat-pusat pembangunan ekonomi.Seiring dengan perkembangan jaringan transportasi dan jalan, akses di beberapa daerah menjadi lebih mudah. Kegiatan sosial berkembang tidak hanya di satu bidang, tetapi juga di semua bidang. Sementara itu, di daerah dengan akses rendah, status sosial ekonomi masyarakat masih tertinggal karena sulitnya akses ke daerah tersebut (Farida, 2013). Aksesibilitas dalam hal ini dimaksudkan sebagai keadaan suatu wilayah dan kemampuan wilayah tersebut untuk dapat dikases oleh pihak luar baik secara fisik maupun non-fisik. Berikut adalah Kondisi Aksebilitas dari Kalurahan Bangunkerto Menuju Pusat Kota dan Kapanewon Turi:

a) Aksebilitas menuju pusat kota.Kondisi aksebilitas antara Kalurahan Bangunkerto menuju pusat kota/pemerintahan Kabupaten Sleman yakni berjarak 7 km sedangkan aksebilitas antara kalurahan bangunkerto menuju ibukota provinsi yogyakarta yakni 15 km

b) Aksebilitasi dari Kalurahan Bangunkerto menuju Kapanewon Turi yakni berjarak 3 km.

c) Kalurahan Bangunkarto juga memiliki akses yang tidak kalah jauh daya saingnya dengan Kalurahan lainnya dengan melihat beberapa bebrapa jalur darat dari wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 Kapenawon dan 86 Kalurahan. Jalur utama menuju Kapenawon Turi berada strategis menuju Kalurahan Bangunkerto sehingga memudahkan akses terutama dalam bidang pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di wilayah Kalurahan Bangunkerto.

d) Sarana dan Prasana yang ada pada kalurahan ini yakni memandai di Kalurahan ini yaitu adanya perbaiakan jalanm jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

C. Pelaksanaan Kegiataan Penyusunan Data Peningkatan Data Peningkatan Pendapatan Subjek Akses Reforma Agraria

UMKM yang terdapat di Kalurahan Bangunkerto disetiap padukuhan berbeda-beda

yaitu sebagai berikut diantaranya di Padukuhan Wonosari terdapat UMKM Geplak Salak, pada Padukuhan Candi diproduksi UMKM Keripik Salak, Padukahan Ganggong ada UMKM Jamur Tiram yang diproduksi. Masyarakat Kalurahan Bangunkerto ikut serta peran aktif didalam mengembangkan usahan di Padukuhan masing - masing demi mencapai kesejahteraan yang dapat dimanfaatkaan dari UMKM tersebut, dengan adanya pengembangan UMKM ini membuat potensi masyarakat menjadi maju dan berkembang dari sektor ekonomi menjadikan nilai omset yang diterima masyarakat meningkat pertahunnya. Berikut ini merupakan UMKM yang dikembangkan di Padukan Wonosari, Padukuhan Candi, dan Padukuhan Ganggong diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Padukuhan Wonosari merupakan salah satu dari empat padukuhan yang terletak di Kalurahan Bangunkerto, Kapenawon Turi, Kabupaten Sleman, Padukuhan Wonosari yang memiliki komiditas utama memproduksi tanaman salak dengan membuat Geplak Salak dengan menggunakan bahan - bahan sebagai berikut buah salak, kelapa yang telah di parut, dan Gula Putih, dengan proses fermentasi buah salak yang diolah oleh ibu-ibu warga Padukuhan Wonosari yang kemudian diproduksi lalu di pasarkan secara langsung ke toko serta dijual secara online melalui postingan di media sosial dan di jual di posko Padukuhan Wonosari. Geplak salak pada musim panen raya apabila salak yang di produksi besaran kisaran harganya Rp. 2.000- Rp 1.500 dalam omset pemasukan di Padukuhan Wonosari.



Gambar 3. Proses Pembuatan Geplak Salak di Posko Padukuhan Wonosari

Sumber: Penelitian, 2025



Gambar 4. Hasil Produksi Geplak Salak di Kalurahan Bangunkerto, Padukuhan Wonosari

Sumber: Penelitian, 2025

2. Padukuhan Candhi terletak juga di Kalurahan Bangunkerto, merupakah salah satu Padukuhan yang memiliki UMKM yang memproduksi Keripik Salak yang dikembangkan oleh warga setempat dalam mengusahakan dan mengembangkan usaha masyarakat melalui kegiatan UMKM masyarakat yang ada.



Gambar 5. Proses Pembuatan Keripik Salak Di Padukuhan Candhi, Kalurahan Bangunkerto

Sumber: Penelitian, 2025



Gambar 6. Hasil Produksi Keripik Salak di Padukuhan Candhi,

Kalurahan Bangunkerto

Sumber: Penelitian, 2025

3. Padukuhan Ganggong, termasuk Padukuhan yang berada di Kalurahan Bangunkerto, padukuhan ini terdapat UMKM pengembangan usaha Jamur Tiram, yang sudah dikembangkan usahanya demi mencapai kesejahteraan warga Padukuhan Ganggong.



Gambar 7. Proses Pembuataan Jamur Tiram di Padukuhan Ganggong,

Kalurahan Bangunkerto

Sumber: Penelitian, 2025



Gambar 8. Hasil dari pembuatan Jamur Tiram di Padukuhan Ganggong, Kalurahan Bangunkerto

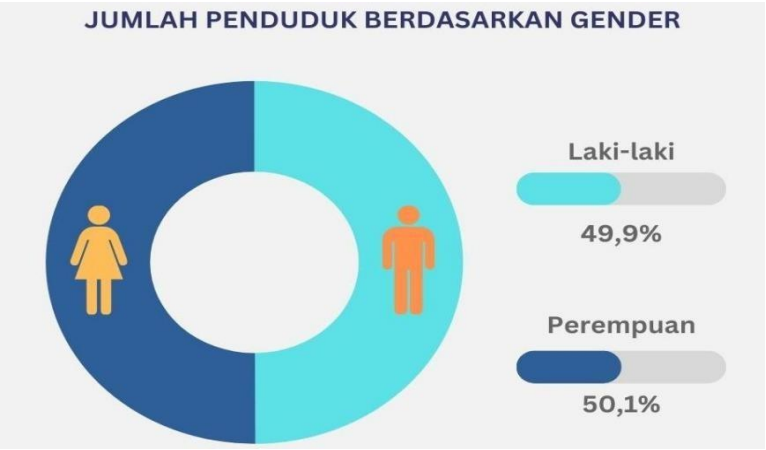
Sumber: Penelitian, 2025

D. Kondisi Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2022, jumlah penduduk di Kalurahan Bangunkerto tercatat sejumlah 9.492 jiwa atau sekitar 22,22% dari total penduduk di Kapanewon Turi. Jumlah tersebut terdiri dari 4.739 jiwa laki-laki dan 4.753 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) ada 3.317 KK dengan rincian 2.665 kepala keluarga laki-laki dan 652

kepala keluarga perempuan. Penduduk Kalurahan Bangunkerto secara garis besar masuk pada kategori usia produktif (15th – 64th) yaitu sebesar 67,8 % dan usia non produktif (di bawah 15th dan di atas 65th) yaitu sebesar 32,2 %.



Gambar 9. Presentase jumlah kependudukan berdasarkan gender

Sumber: Pemerintah Kalurahan bangunkerto tahun 2024

E. Profil Sosial Budaya Kalurahan Bangunkerto

Kalurahan Bangunkerto berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 dengan wilayah berupa gabungan dari 3 kalurahan lama, yaitu Kalurahan Wonosari, Kalurahan Ganggong, dan Kalurahan Selobonggo. Kalurahan Bangunkerto didirikan oleh Marto Prasetyo sebagai Lurah pertama dibantu dengan beberapa rekannya yang menjadi pamong. Kalurahan Bangunkerto didominasi dengan wilayah yang tandus dan gersang, kemudian dinamakan Bangunkerto dengan harapan dapat dibangun untuk menuju kemakmuran. Sejak berdiri hingga tahun 2024, Kalurahan Bangunkerto telah berganti pemimpin (lurah) sebanyak 7 (tujuh) kali. Kalurahan Bangunkerto telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 454/KEP/2023 tertanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya. Ditetapkannya sebagai Desa Mandiri Budaya diharapkan agar pembangunan di Kalurahan Bangunkerto lebih menekankan pada konsep sosial dan pelestarian budaya setempat. Kalurahan Bangunkerto memiliki aneka ragam kebudayaan yang sampai saat ini tetap dilestarikan, bahkan digalakkan lagi guna menunjang kegiatan wisata di Kalurahan tersebut.

F. Potensi Kalurahan Bangunkerto

Kalurahan Bangunkerto mempunyai beragam potensi utama sebagai penopang perekonomian, diantaranya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Wilayah Kalurahan Bangunkerto secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa: lahan pertanian, terutama salak pondoh, lombok, jagung dan sayur. Perkebunan menjadi sektor yang paling diunggulkan di Desa Bangunkerto dimana komoditas utamanya berasal dari perkebunan salak pondoh. Salak pondoh dapat dengan mudah sekali ditemukan di berbagai daerah di Desa Bangunkerto.



Gambar 10. Pohon salak pondoh

Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan Kalurahan Bangunkerto berperan langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun perang tidak langsun melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain

Kalurahan Bangunkerto mempunyai potensi perikanan seperti Padukuhan Gadung, Kelor, Bangunharjo, Bangunsari, dan Kendal. Pengelolaan perikanan secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan memeratakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan akan adanya pembuatan pasar ikan mudah-

mudahan dapat mendukung perolehan Pendapatan Asli Kalurahan secara maksimal, serta membawa citra daerah di mata masyarakat di luar Kalurahan Bangunkerto.



Gambar 11. Budidaya ikan dan potensi peternakan

Sumber: Penelitian, 2025

Perspektif budaya masyarakat di Kalurahan Bangunkerto masih sangat kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat di mengerti karena hampir semua dusun masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Keraton Kesultanan maupun Pakualaman yang ada di Yogyakarta. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat, dengan tradisi budaya Jawa kesenian-kesenian seperti Hadroh, Sholawatan, Kethoprak, Jathilan, kegiatan lain sebagai peringatan hari-hari besar islam/adat lainnya seperti Mauludan, Nyadran, Suran, Selikuran, Kenduri, Nyewu, Wiwitan, Kondangan, dsb. Semua itu sebagai perwujudan dari rasa syukur dan kerukunan warga masyarakat.

Di Kalurahan Bangunkerto terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang masih ada sampai sekarang. Kesenian kuda lumping merupakan kesenian asli daerah. Selain hal tersebut penduduk di Kalurahan Bangunkerto banyak yang masik tertarik dengan kesenian kudah lumping sehingga sampai saat ini keberadaan keseniannya masih exist.

NO	Nama / jenis	Jumlah kelompok	Jumlah anggota
1	Hadro	13	325
2	Solawat Barjanjen	15	450
3	Dayakan	1	50

4	Badui	2	90
5	Kobro siswo	10	500
6	Jatilan	6	560
7	Ketoprak	1	35
8	Karawitan	3	75
9	Bregodo	3	300

Tabel 1. Kesenian sebagai kegiatan kebudayaan

Sumber: Penelitian, 2025

Selain itu masyarakat juga masih mempertahnkan adat budaya asli daerah, masih menjalankan berbagai upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *live circle,* diantaranya adalah :

1. Upacara Mitomi, yaitu selamatan pada saat usia kehamilan mencapai genap tujuh bulan.
2. Upacara Puputan, yaitu upacara selamatan pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering
3. Jagongan/mido daren, yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu)
4. Selapanan, yaitu acara kenduri atau Selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 (tiga puluh lima hari) sebagai ungkapan rasa syukur.
5. Upacara Kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
6. Upacara Khitanan, yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai menginjak aqil balig berangkat menjadi laki-laki dewasa.

Upacara pernikahan, dengan berbagai urutan pernak pernik tradisi jawa, seperti siraman, midodareni dan resepsi panggih temantenan, dsb.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	1.000	600	400

2	Pelajar/Mahasiswa	1.150	600	550
3	Petani/Perkebunan	1.100	750	350
4	Mengurus Rumah Tangga	1.200	50	1.150
5	Karyawan Swasta	800	500	300
6	Wiraswasta	950	700	250
7	Buruh Harian Lepas	750	500	250
8	Pensiunan	200	150	50
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	400	250	150
10	Buruh Tani/Perkebunan	600	450	150
11	Guru	300	120	180
12	Pedagang	500	200	300
13	Perdagangan	350	200	150
14	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	120	120	0
15	Karyawan Honorer	150	80	70
16	Kepolosian RI (POLRI)	100	100	0
17	Sopir	220	220	0
18	Karyawan BUMN	180	120	60
19	Perangkat Desa	90	60	30
20	Dosen	60	40	20
	TOTAL	10.220	5.910	4.010

Tabel 2. Penduduk menurut mata pencaharian

Sumber: Pemerintah Kalurahan Bangunkerto tahun 2023

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA DAN FASILITAS AKSES PEMASARAN DI KALURAHAN BANGUNKERTO

A. HASIL

1. Pelaksanaan akses reforma agraria dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

   Pelaksanaan program akses dalam reforma agraria di kelurahan Bangunkerto merupakan bagian dari gerekan sinergi reforma agraria. Tujuannya untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui penataan akses usai proses penataan asset selesai. Program ini digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan didukung oleh perangkat daerah sesuai bidangnya. Dengan begitu, pelaksanaannya tidak sebatas urusan administrasi, tetapi juga fokus pada pemberdayaan ekonomi warga. Khusus di Bangunkerto, akses reforma agrari berfungsi untuk memperkuat kemampuan ekonomi para pengusaha reforma agraria melalui pendamping usaha serta bantuan dalam pemasaran produk.

   Hasil dari pelaksanaan program menunjukan bahwa masyarakat penerima manfaat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha yang berbasis potensi lokal, khususnya di sektor UMKM dan bidang ekonomi produktif lainnya. Melalui program ini, masyarakat mendapat akses terhadap bantuan, pendampingan, serta dukungan pembangunan usaha yang sebelumnya sulit diperoleh karena terkendala modal, pengetahuan, dan jaringan pemasaran. Dengan begitu, pelaksanaan reforma agraria di Bangunkerto tidak hanya sebatas pada pemberian ha katas tanah, tetpi juga dilanjutkan dengan upaya nyata agar tanah tersebut dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Hasil data di dapatkan dari Laporan Akhir PENGEMBANGAN USAHA DAN FASILITASI AKSES PEMASARAN, PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN KETIGA 2024 disusun oleh Arcelina Dwi Martanti (Tenaga Pendukung).

2. Kendala dan solusi dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, ditemukan bahwa masyarakat setempat pada umumnya sudah memiliki potensi usaha, terutama pada sektor pertanian dan usaha mikro, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan usaha secara mandiri. Program pendampingan yang dijalankan bertujuan membantu masyarakat agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pemasaran.

Berdasarkan hasil lapangan, kendala utama yang dihadapi masyarakat adalah minimnya pemahaman terkait menajemen usaha, legalitas usaha, dan strategi pemasaran. Sebagian besar pelaku usaha masih menjual produk dengan cara yang sederhana, belum menerapkan pencatatan keuangan yang sistematis, serta belum menyadari pentingnya dokumen legal seperti NIB dan sertifikasi halal dalam upaya memperluas jangkauan pasar. Di samping itu, jaringan pemasaran masyarakat masih terbatas pada lingkup lokal, sehingga produk yang dihasilkan belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, kegiatan pendampingan terbukti dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penguatan kelembagaan, peningkatan mutu produk, dan kerja sama antar pihak. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan di Bangunkerto dan sekitarnya, masyarakat juga diperkenalkan pada model usaha alternatif serta mendapatkan pendampingan teknis yang mendorong mereka untuk lebih proaktif dalam mengelola usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa program pendampingan memberikan dampak positif, meskipun masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat berkelanjutan. Hasil data di dapatkan dari Laporan Akhir PENGEMBANGAN USAHA DAN FASILITASI AKSES PEMASARAN, PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN KETIGA 2024 disusun oleh Arcelina Dwi Martanti (Tenaga Pendukung).

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan akses reforma agraria dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

   Secara konseptual, penataan akses pada reforma agraria adalah tahap lanjutan dari penataan asset dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi tanah bagi masyarakat. Dalam konteks kelurahan Bangunkerto, implementasi akses reforma agraria mengarah pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pendamping usaha, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses pasar. Hal ini sejalan dengan tujuan utama reforma agrarian yaitu menciptakan kemakmuran melalui distribusi manfaat ekonomi yang lebih berkeadilan. Pada pelaksanaannya, pendampingan usaha menjadi unsur krusial karena sebagian besar penerima manfaat masih mengalami kesulitan dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Permasalahan itu muncul dari keterbatasan di bidang manajerial, pemasaran, dan pengembangan skala usaha, terutama pada sektor UMKM yang menjadi fokus kajian di Bangunkerto. Karena itu, fasilitasi pemasaran memegang peran penting agar produk masyarakat tidak hanya mampu diproduksi, tetapi juga dapat diserap pasar secara optimal. Tanpa adanya dukungan pemasaran, peningkatan produksi tidak akan serta merta diikuti oleh peningkkatan pendapatan masyarakat.

   Keterlibatan lintas sektor juga menjadi faktor kunci dalam implementasi akses reforma agrarian di Bangunkerto. Kerja sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan peragkat daerah membuktikan bahwa reforma agraria tidak akan berjalan optimal apabila hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Sinergi antar instansi diperlukan supaya pendampingan yang diberikan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari aspek produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Dengan pendekatan seperti ini, akses reforma agraria memiliki peran pemberdayaan yang lebih konkrit karena tidak terbatas pada aspek legalitas tanah, melainkan juga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dari sisi dampak sosial-ekonomi, pelaksanaan akses reforma agraria di Bangunkerto dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun kemandirian para penerima manfaat. Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif berdasarkan sumber daya yang ada, serta membuka peluang peningkatan

kesejahteraan. Akan tetapi, hasil penelitian menemukan bahwa masih ada kendala dalam pengembangan UMKM, sehingga pelaksanaan akses reforma agraria belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena it, keberhasilan program sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendamping, dukung kelembagaan, dan ketersediaan akses pasar yang berkelanjutan.

2. Kendala dan solusi dalam kegiatan pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman bagi masyarakat setempat.

Kegiatan pendamping pengebangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Bangunkerto pada dasarnya merupakan bagian dari penataan akses reforma agraria, yaitu upaya agar masyarakat tidak hanya memperoleh tanah atau akses ekonomi, tetapi juga mampu mengelolanya menjadi sumber kesejahteraan. Dalam praktiknya, masyarakat tidak cukup hanya diberi bantuan modal atau sarana produksi, melainkan perlu didampingi secara berkelanjutan agar usaha yang dirintis dapat tumbuh dan bertahan.

Kendala pertama yang menonjol adalah rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam aspek manajemen dan pemasaran. Kondisi ini membuat produk masyarakat sulit berkembang karena pengelolaan usaha masih dilakukan seraca tradisional. Secara teoritis, keadaan seperti umum terjadi pada usaha kecil yang belum memiliki pendamping intenksif, sehingga mereka kesulita menyusun strategi usaha, menghitung biaya produksi, dan membaca peluang pasar.

Kendala kedua adalah terbatasnya akses pemasaran. Produk masyarakat Bangunkerto umumnya masih dipasarkan secara lokal dan belum masuk ke jaringan ditribusi yang lebih luas. Padahal, tanpa akses pasar yang memadai, hasil produksi beresiko tidak terserap optimal sehingga pendapatan masyarakat sulit meningkat, Oleh karena itu, fasilitas pemasaran menjadi sangat penting sebagai jembatan antara produksi dan peningkatan kesejahteraan.

Kendala ketiga adalah belum kuatnya legalitas dan kelembagaan usaha. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya NIB, sertifikasi halal, dan bentuk legalitas lain yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Di samping itu, kelembagaan usaha masyarakat juga masih perlu diperkuat agar

mereka mampu bekerja sama, membagi tugas, dan membangun posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi pasar.

Adapun solusi yang dilakukan adalah melalui pendamping terintegrasi, yaitu pendampingan yang mencakup produksi, manajemen, legalitas, dan pemasaran. Solusi ini penting karena masalah usaha masyarakat bersifat saling terkait; jika hanya satu aspek yang dibantu, maka hasilnya kurang optimal. Misalnya, pelatihan manajemen usaha tanpa akses pasar tidak akan cukup, begitu pula legalitas usaha tanpa peningkatan kualitas produk akan sulit memberi manfaat nyata.

Solusi berikutnya adalah penguatan jejaringan kerja sama lintas sektor. Dalam kegiatan reforma agraria, kolaborasi antara pemerintah, Lembaga pendamping, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk membuka akses lebih luas, baik terhadap pelatihan, pembiayaan, maupun pemasaran. Jejaringan ini juga membantu masyarakat mendapatkan informasi, dukungan teknis, dan peluang kerja sama usaha yang lebih stabil.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Penanganan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto telah berjalan sesuai dengan target dari BPN dan masyarakat sangat antusias dengan adanya program Reforma Agraria untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup bagi warga yang tinggal di Kalurahan Bangunkerto. Antusias masyarakat Kalurahan Bangunkerto diharapkan memaksimalkan potensi yang terdapat di Kalurahan Bangunkerto baik di sektor Budidaya Perikanan dan UMKM . Dari hasil penelitian yang peneliti sajikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat pada dasarnya sangat merasa terbantukan melalui program Penataan Akses Reforma Agraria dalam kegiataan Pendampingan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran di Kalurahan Bangunkerto karena membantu meningkatkan UMKM dari berbagai sektor pada umunya. Kalurahan Bangunkerto mempunyai ciri khas khusus yaitu dari hasil pengelolaan usaha penjualan Salak.

2. Pendampingan dan Pengembangan usaha ini juga membuat masyarakat menjadikan modal dan bekal bagi warga Kalurahan Bangunkerto untuk melatih dan menambah wawasan pengetahuan dalam modal berusaha untuk dapat bertahan hidup.

3. Pelestarian Budaya serta UMKM yang telah ada pada Kalurahan Bangunkerto diharapkan juga dapat memajukan Kalurahan ini mennjadi Kalurahan percontohan bagi Kalurahan-Kalurahan lain yang ada disekitar, yang memberikan dampak positif bagi semua lapisan komponen masyarakat yang ada.

B. Saran

1). Saran untuk kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

1. Memperkuat kelembagaan lokal seperti kelompok tani, kelompok usaha bersama,atau koperasi untuk memudahkan akses pembiayaan, pelatihan, dan negosiasi pasar.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan partisipatif agar program sesuai kebutuhan dan memiliki rasa kepemilikan.
3. Menetapkan sistem monitorong partsipasif yang melibatkan warga untuk mengevaluasi

progres program Reforma Agraria dan dampaknya terhadap kesejahteraan.

2). Saran untuk Pemerintah Desa (Kelurahan) dan Pemerintah Daerah

1. Memperkuat koordinasi dengan BPN dinas terkait untuk memastikan kelanjutan program Reforma Agraria, termasuk pembagian akses lahan, administrasi sertifikat, dan fasilitas permodalan bagi pelaku UMKM dan budidaya perikanan
2. Menetapkan Kalurahan Bangunkerto sebagai lokasi percontohan (pilot) pengembangan UMKM dan budidaya perikanan dengan dukungan anggaran dan kebijakan lokal, sehingga praktik baik dapat direplikasi ke kelurahan sekitar.
3. Menyusun kebijakan insentif lokal (bantuan alat produksi, subsidi pupuk/pakan ikan, kemudahan perizinan) untuk meningkatkan produktivitas usaha khas seperti penjualan salak dan usaha berbasis perikanan.

3). Saran bagi BPN:

1. Lebih mendetailkan penjelasan kepada masyarakat guna memaksimalkan potensi yang terdapat dimasyarakat, karena tidak jarang masyarakat yang mengeluh tentang sulit nya untuk melakukan diskusi dengan BPN maupun pihak terkait untuk menyalurkan aspirasi.
2. Membantu melakukan pengkaderan bagi bagi masyarakat penerima Akses Reforma Agraria sehingga dari hasil pengkaderan tersebut perwakilan masyarakat penerima akses dapat membantu sebagai penerjemah program apa yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda Resti, F., Wulansari, H., Pertanahan Kabupaten Seruyan, K., Moh Hatta No, J., Tengah, K., Tinggi Pertanahan Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 2).

Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). (N.D.).

Arisaputra, M. I. (N.D.). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial*. Http://Www.Kompas.Com/Kompas-Cetak/0309/24/Opini/ 576798.Htm,

Fatimah. (2015). *Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia.*

Hadi Arnowo. (2024). *22 Hadi Arnowo, Diversifikasi Usaha Untuk Keberlanjutan Lingkungan Dalam Kerangka Reforma Agraria Melalui*.

Harsono. (2012). *Fasilitasi Peran Sarana Dan Prasarana Terhadap Produktivitas Kerja Ukm Di Kota Magelang-Harsono | 237 The Effects Of Facilities And Infrastructures Toward The Productivity Of Sme's Work In Magelang City*. Http:// Id.Id.Facebook.Com/Pages/Makanan-Ringan/

Junarto, R., Luthfi, A. N., Wijanarko, T. F., Wulansari, H., Tinggi, S., Nasional, P., Tata, J., & Nomor, B. (N.D.). *Reforma Agraria: Refleksi Atas Kinerja Gtra Di Diy Hasil Penelitian Reforma Agraria: Refleksi Atas Kinerja Gugus Tugas Reformasi Agraria (Gtra) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Agrarian Reform: The Reflection On The Performance Of The Agrarian Reform Task Force (Gtra) In The Special Region Of Yogyakarta)*.

Lutfi Isnaini, D. M. A. A. (2018). *Keragaan Dan Potensi Agribisnis Salak Di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*.

Mangkuprawira, S. (N.D.). *Strategy To Improve Social Capital Capacity And Human Resource Quality As Facilitator In Agricultural Development*.

Putra, A. H. (N.D.). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. In *Artikel Jurnal Analisa Sosiologi Oktober* (Vol. 2016, Issue 2).

Saheriyanto, A. S. (2021). *Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Assistance And Capital Access As A Strategy For Access Reform From The Release Of Forest Area In Barito Kuala Regency*.

Sumanto, L. (2023). Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep Dan Implementasi. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, *1*(1), 39–48. Https://Doi.Org/ 10.25105/Jhna.V1i1.16588

Windusancono, B. A. (2021). (N.D.).

Wulan Pujiriyani, D. (2022a). Jurnal Widya Bhumi Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan Dan Limitasinya. In *Widya Bhumi* (Vol. 2, Issue 1).

Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, & Fahrur Rozi. (2024). Analisa Peran Umkm Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, *2*(4), 53–62. Https://Doi.Org/10.59024/ Jumek.V2i4.464